EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2023 Per 13 JULI 2023

I. RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN BERSAMA PEMERINTAH (PEMBICARAAN TINGKAT I) [16 RUU TERDIRI DARI 5 RUU USUL DPR; 5 RUU USUL PEMERINTAH; 1 RUU USUL DPD; 5 RUU KUMULATIF TERBUKA]

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR/ ANGGOTA	RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi II Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 3 Desember 2020 MP II 2019-2020 dibahas oleh Komisi II Surpres tgl 12 Juni 2020 No.R-28/Pres/06/2020 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 2 April 2020 Selesai Harmonisasi Tgl 19 Februari 2020 Surat Pengusul (2 orang Anggota dari Fraksi Gerindra) No.2127/II/2020, Tgl 5 Februari 2020, permintaan utk di harmonisasi
2	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR/ KOMISI IV	RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi IV Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 19 Sept 2022 MP I 2022-2023 dibahas oleh Komisi IV Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 7 Juli 2022 Selesai Harmonisasi Surat Pengusul (Komisi IV) permintaan Harmonisasi (Surat No. 108/Kom.IV/DPR RI/XI/2021 tgl 30 November 2021)
3	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR/ANGGOTA	RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi VIII Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 19 Sept 2022 MP I 2022-2023 dibahas oleh Komisi VIII Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 30 Juni 2022 Selesai Harmonisasi Surat Pengusul (Anggota) permintaan Harmonisasi (Surat No. B.III.1316/FPKB/DPR-RI/I/2022)
4	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.	DPR/ KOMISI VII	RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi VII Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 19 Sept 2022 MP I 2022-2023 dibahas oleh Komisi VII Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 14 Juni 2022 Selesai Harmonisasi Surat Pengusul (Komisi VII) permintaan Harmonisasi (Surat No. LG/09047/DPR RI/VII/2021 tgl 5 Juli 2021)
5	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi III Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 3 Feb 2022 MP III 2021-2022 dibahas oleh Komisi III Surpres No. R-02/Pres/01/2022 tgl 14 Januari 2022

	Per 13 Juli 2023		
NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
6	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi III Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 26 Agustus 2021 MP I 2021-2022 dibahas oleh Komisi III Surpres tgl 3 Agustus 2021 nomor R-35/Pres/08/2021
7	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPD	 RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 16 Juni 2020 MP IV 2019-2020 dibahas oleh Pansus Surpres Tgl 20 Mei 2020 Nomor : R-24/Pres/05/2020 (Mendagri, Menkeu, Bapennas, Menlu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menkumham)
8	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR/ BADAN LEGISLASI	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Badan Legislasi Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 13 Jan 2022 MP III 2021-2022 dibahas oleh Badan Legislasi Surpres Tgl 2 Desember 2021 Nomor: R-55/Pres/12/2021 (Mendikbudristek, Menkes, Mendagri, Menkeu, MenpanRB, dan Menkumham) Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 30 September 2021 Selesai Penyusunan Tgl 23 September 2021
9	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 9 Nov 2022 MP II 2022-2023 dibahas oleh Komisi I Surpres Tgl 16 Desember 2021 Nomor: R-58/Pres/12/2021
10	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa).	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I RUU Kumulatif Terbuka Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 23 Mei 2022 MP V 2021-2022 dibahas oleh Komisi I
11	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I RUU Kumulatif Terbuka Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 9 Nov 2022 MP II 2022-2023 dibahas oleh Komisi I Surat Presiden RI nomor: R-45/Pres/09/2022, tanggal 20 September 2022

	rei 13 Juli 2023		
NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	Field of Defence)		
12	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I RUU Kumulatif Terbuka Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 9 Nov 2022 MP II 2022-2023 dibahas oleh Komisi I Surat Presiden RI nomor: R-48/Pres/10/2022, tanggal 20 Oktober 2022
13	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR/ANGGOTA	 RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi III RUU Kumulatif Terbuka Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 7 Feb 2023 MP III 2022-2023 dibahas oleh Komisi III Surpres Tgl 28 Nov 2022 Nomor : R-61/Pres/11/2022.
14	Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 14 Maret 2023 MP IV 2022-2023 dibahas oleh Pansus Surat Presiden Nomor: R-08/Pres/02/2023, tanggal 20 Februari 2023
15	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi II Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 5 Juli 2023 dibahas oleh Komisi II Surat Presiden Nomor: R-32/Pres/06/2023 tanggal 19 Juni 2023
16	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022	PEMERINTAH	 RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Badan Anggaran RUU Kumulatif Terbuka Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 5 Juli 2023 dibahas oleh Badan Anggaran Surat Presiden Nomor: R-33/Pres/06/2023 tanggal 27 Juni 2023

II. RUU AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I [5 RUU TERDIRI DARI 2 RUU USUL DPR; 1 RUU USUL PEMERINTAH; DAN 2 RUU USUL DPD]

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/ BADAN LEGISLASI	Disetujui menjad RUU usul DPR pada Paripurna Tgl 21 Maret 2023 Selesai penyusunan Badan Legislasi Tgl 1 Juli 2020
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	PEMERINTAH	Surpres sudah disampaikan ke DPR RI
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-	DPD	Surat DPD RI No: PU.00/458/DPD RI/III/2023, Tgl 6 Maret 2023

	·		
NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.		
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah.	DPD	Surat DPD RI No: PU.00/458/DPD RI/III/2023, Tgl 6 Maret 2023
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	DPR/ BADAN LEGISLASI	 RUU Kumulatif Terbuka Menunggu Surpres Disetujui menjad RUU usul DPR pada Paripurna Tgl 13 Juli 2023 Selesai penyusunan Badan Legislasi Tgl 3 Juli 2023
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.	PEMERINTAH	Surpres sudah disampaikan ke DPR RI

III. RUU DALAM TAHAP HARMONISASI DI BADAN LEGISLASI DPR RI [35 RUU TERDIRI DARI 2 RUU USUL AKD 1 RUU USUL ANGGOTA, 32 RUU KUMULATIF TERBUKA]

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/ ANGGOTA	Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR Selesai Harmonisasi Tgl 4 September 2020 Surat Pengusul (12 Anggota FP Nasdem) No. F.NasDem.054/DPR-RI/II/2020 tgl 6 Februari 2020 permintaan utk diharmonisasi
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR/ KOMISI VI	RUU dalam tahap Harmonisasi Surat Pengusul (Komisi VI) permintaan Harmonisasi (Surat No. B/16783/LG.01.01/12/2021 14 Desember 2021)
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Utara	DPR/ ANGGOTA	Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR Selesai Harmonisasi Tgl 3 Oktober 2022 Surat Pengusul (Yan Permenas Mandenas F-Gerindra, permintaan Harmonisasi Nomor 669/I/A-136/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 (Kumulatif Terbuka)
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR/ KOMISI IX	RUU dalam tahap Harmonisasi
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya di Provinsi Sulawesi Tengah	DPR/ ANGGOTA	RUU Kumulatif Terbuka
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Parigi di Provinsi Sulawesi Tengah	DPR/ ANGGOTA	RUU Kumulatif Terbuka

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mountong di Provinsi Sulawesi Tengah	DPR/ ANGGOTA	RUU Kumulatif Terbuka
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	KOMISI VII	 RUU Kumulatif Terbuka RUU dalam Proses Harmonisasi Surat Pengusul permintaan harmonisasi, (Komisi VII DPR RI) Nomor: B/4940/LG.01/2023 tanggal 12 April 2023
9.	27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota	KOMISI II	RUU Kumulatif Terbuka • Menunggu Paripurna Persetujuan menjadi RUU Usul DPR • Selesai diharmonisasi tgl 6 Juli 2023 • Surat Pengusul permintaan harmonisasi, (Komisi II DPR RI) Nomor:

IV. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPR RI [14 RUU TERDIRI DARI 7 RUU USUL BALEG, 5 RUU USUL KOMISI, 2 RUU USUL ANGGOTA]

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR/ KOMISI I	Proses penyusunan di Komisi I
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR/ KOMISI III	Proses penyusunan di Komisi III
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	DPR/ KOMISI VI	Proses penyusunan di Komisi VI
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR/ KOMISI VIII	Proses penyusunan di Komisi VIII
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-	DPR/ KOMISI X	Proses penyusunan di Komisi X

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.		
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.	DPR/ ANGGOTA	Proses penyusunan di Anggota
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.	DPR/ ANGGOTA	Proses penyusunan di Anggota

V. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI PEMERINTAH (3 RUU)

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)	PEMERINTAH	Proses Penyusunan di internal Pemerintah (Pemrakarsa Kementerian Kesehatan)
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.	PEMERINTAH	Proses Penyusunan di internal Pemerintah
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	Proses Penyusunan di internal Pemerintah

VI. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPD

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.			
2.			

VII. RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU [13 RUU TERDIRI DARI 2 (DUA) RUU USUL DPR; 1 RUU USUL PEMERINTAH; DAN 10 RUU KUMULATIF TERBUKA)

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang	DPR	 Disetujui menjadi UU pada Paripurna tanggal 15 Desember 2022
	Pengembangan dan Penguatan		35
	Sektor Keuangan (judul dlm Prolegnas:		Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 ditetapkan dalam Rapur tanggal 15
	RUU ttg Reformasi Pengembangan dan		Desember 2022,
	Penguatan Sektor Keuangan)		

2.	Rancangan Undang-Undang tentang	PEMERINTAH	RUU Kumulatif Terbuka
	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang		 Disetujui menjadi UU pada Paripurna tanggal 21 Maret 2023 Selesai dibahas di Baleg tgl 15 Februari 2023 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 14 Februari 2023 dibahas oleh Baleg Surpres Tgl 9 Januari 2023 Nomor :R01/PRES/01/2023 (Menkoperekonomian, Menkopolhukam, Menaker, Menag dan Menkumham)
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	PEMERINTAH	 RUU Kumulatif Terbuka Disetujui menjadi UU pada Paripurna tanggal 4 April 2023 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 14 Feb 2023 MP III 2022-2023 dibahas oleh Komisi II dan dibahas pada MP IV Surpres Tgl 13 Januari Nomor : R-02/Pres/01/2023.
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (RUU tentang Landas Kontinen)	PEMERINTAH	 Disetujui menjadi UU pada Paripurna tanggal 13 April 2023 Disetujui menjadi UU pada Paripurna tanggal 4 April 2023 (Rapat ditunda) Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 25 Nov 2020 MP II 2020-2021 dibahas oleh Pansus Surpres tgl 8 Oktober 2020 nomor R-42/PRES/10/2020
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara	DPR	RUU Kumulatif Terbuka Disetujui menjadi UU pada Paripurna tanggal 4 April 2023 Surpres Tgl 25 Januari 2023 Nomor: R-05/Pres/01/2023. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 7 Feb 2023 MP III 2022-2023 dibahas oleh Komisi II Selesai Harmonisasi Tgl 31 Agustus 2022 Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi Nomor B/265/LG.01.01/7/2022 tanggal 5 Juli 2022
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan	DPR	 RUU Kumulatif Terbuka Disetujui menjadi UU pada Paripurna tanggal 4 April 2023 Surpres Tgl 25 Januari 2023 Nomor: R-05/Pres/01/2023. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 7 Feb 2023 MP III 2022-2023 dibahas oleh Komisi II Selesai Harmonisasi Tgl 31 Agustus 2022 Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi Nomor B/265/LG.01.01/7/2022 tanggal 5 Juli 2022
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur	DPR	 RUU Kumulatif Terbuka Disetujui menjadi UU pada Paripurna tanggal 4 April 2023 Surpres Tgl 25 Januari 2023 Nomor: R-05/Pres/01/2023. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 7 Feb 2023 MP III 2022-2023 dibahas oleh Komisi II Selesai Harmonisasi Tgl 31 Agustus 2022

	Per 13 Juli 2023		
			• Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi Nomor B/265/LG.01.01/7/2022 tanggal 5 Juli 2022
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah	DPR	 RUU Kumulatif Terbuka Disetujui menjadi UU pada Paripurna tanggal 4 April 2023 Surpres Tgl 25 Januari 2023 Nomor: R-05/Pres/01/2023. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 7 Feb 2023 MP III 2022-2023 dibahas oleh Komisi II Selesai Harmonisasi Tgl 31 Agustus 2022 Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi Nomor B/265/LG.01.01/7/2022 tanggal 5 Juli 2022
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat	DPR	 RUU Kumulatif Terbuka Disetujui menjadi UU pada Paripurna tanggal 4 April 2023 Surpres Tgl 25 Januari 2023 Nomor: R-05/Pres/01/2023. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 7 Feb 2023 MP III 2022-2023 dibahas oleh Komisi II Selesai Harmonisasi Tgl 31 Agustus 2022 Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi Nomor B/265/LG.01.01/7/2022 tanggal 5 Juli 2022
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku	DPR	RUU Kumulatif Terbuka Disetujui menjadi UU pada Paripurna tanggal 4 April 2023 Surpres Tgl 25 Januari 2023 Nomor: R-05/Pres/01/2023. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 7 Feb 2023 MP III 2022-2023 dibahas oleh Komisi II Selesai Harmonisasi Tgl 31 Agustus 2022 Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi Nomor B/265/LG.01.01/7/2022 tanggal 5 Juli 2022
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah	DPR	 RUU Kumulatif Terbuka Disetujui menjadi UU pada Paripurna tanggal 4 April 2023 Surpres Tgl 25 Januari 2023 Nomor: R-05/Pres/01/2023. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 7 Feb 2023 MP III 2022-2023 dibahas oleh Komisi II Selesai Harmonisasi Tgl 31 Agustus 2022 Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi Nomor B/265/LG.01.01/7/2022 tanggal 5 Juli 2022
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali	DPR	 RUU Kumulatif Terbuka Disetujui menjadi UU pada Paripurna tanggal 4 April 2023 Surpres Tgl 25 Januari 2023 Nomor: R-05/Pres/01/2023. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 7 Feb 2023 MP III 2022-2023 dibahas oleh Komisi II Selesai Harmonisasi Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi (B/1038/LG.01.01/1/2022 tanggal 17

Per 13 Juli 2023

			Januari 2022)
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (<i>Omnibus Law</i>) Dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional)	DPR	 Disetujui menjadi UU pada Paripurna tgl 11 Juli 2023 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 14 Februari 2023 dibahas oleh Komisi IX (Pembahasan dimulai pada MP IV 2022-2023) Surat Presiden Nomor: R-16/Pres/03/2023, tanggal 9 Maret 2023 Selesai Penyusunan di Badan Legislasi tgl 7 Februari 2023 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 16 Februari 2023

Jakarta, 13 Juli 2023 Set. Badan Legislasi DPR RI